



RENCANA STRATEGIS RENSTRA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

TAHUN

2025 - 2029



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan inayah-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 ini diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program, dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2029.

Dalam penyusunan Renstra ini kami dibantu oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu dan oleh karenanya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Akhir kata kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu kritik serta saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan sehingga dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan secara optimal.

Tenggarong, 09 Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	14
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	30
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	32
2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	34
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	37
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	53
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.....	47
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.....	48
3.3 Strategi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.....	48

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	51
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
4.1 Uraian Program	54
4.2 Uraian Kegiatan	54
4.3 Uraian Sub Kegiatan	69
4.4 Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	83
4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	91
4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	93
BAB V PENUTUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Pejabat Struktural Tahun 2025	17
Tabel 2 Data Jumlah Pejabat Fungsional Tahun 2025	17
Tabel 3 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan	18
Tabel 4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	18
Tabel 5 Jumlah Pejabat Struktural	19
Tabel 6 Jumlah Petugas Operasional telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana	19
Tabel 7 Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat dan Roda Enam ...	20
Tabel 8 Sarana dan Prasarana berupa Peralatan/Perlengkapan	21
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	24
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ...	26
Tabel 9 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	30
Tabel 10 Permasalahan Perangkat Daerah	39
Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	43
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	50
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	52
Tabel 4.2 Teknik merumuskan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	56
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	72
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	84
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	92
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	93

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1.1 : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa konteks memberikan perlindungan terhadap warga negara adalah menerjemahkan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang berarti menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang urusannya dibagi antara kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya diamanatkan dalam 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Startegis (Renstra) Perangkat Daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Seiring diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD setelah pelantikan Kepala Daerah, serta telah dilantikannya Bapak dr. Aulia Rahman Basri sebagai Bupati dan Bapak H. Rendi Solihin sebagai Wakil Bupati periode Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025, maka proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi sebagai bagian dari tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Perangkat Daerah terkait wajib menyusun dokumen perencanaan (rencana strategis) yang mengacu kepada dokumen perencanaan daerah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra

digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 - 2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 - 2029 yang berlandaskan pada Visi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni **Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Proses penyusunan dokumen Renstra ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Strategis Daerah Tahun 2025 - 2029.

Dalam Renstra Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai perangkat daerah dalam lima tahun ke depan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Rencana Strategis sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA). Selain itu merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada

masyarakat di bidang bencana yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Fungsi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 - 2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
10. Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 - 2029 ini adalah sebagai *roadmap* dalam mencapai tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 - 2029 dari aspek penanggulangan bencana. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja perangkat daerah yang disusun setiap tahun sebagai bentuk operasional untuk mencapai visi organisasi yang akan dipaparkan dalam rencana strategis ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Strategis disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan acuan atau pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan.
3. Menjabarkan visi, misi pemerintahan daerah yang termuat dalam dokumen RPJMD.
4. Memudahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.

5. Memudahkan aparaturnya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan Rencana Strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dari berbagai bencana yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat perhatian utama, berikut program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan perangkat pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pengelolaan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam Pemberian Pelayanan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun
2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target,
dan pagu indikatif

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati, gambaran umum pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasi dan pelaksanaan kewenangan otonomi, di mana Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sebagai pemegang amanah Otonomi, menjadi penanggung jawab utama, dan sesuai Undang-Undang mempunyai kewajiban antara lain ; (a) *Melindungi masyarakat.*” dan (b) *Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat*“ Di sisi lain undang-undang juga menyatakan bahwa ; (1) *Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah* (Pasal 22 dan 156; UU NO 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), yang dalam praktek dan implementasi pelayanannya kepada masyarakat/pelayanan publik yang dalam praktek dilaksanakan oleh OPD berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

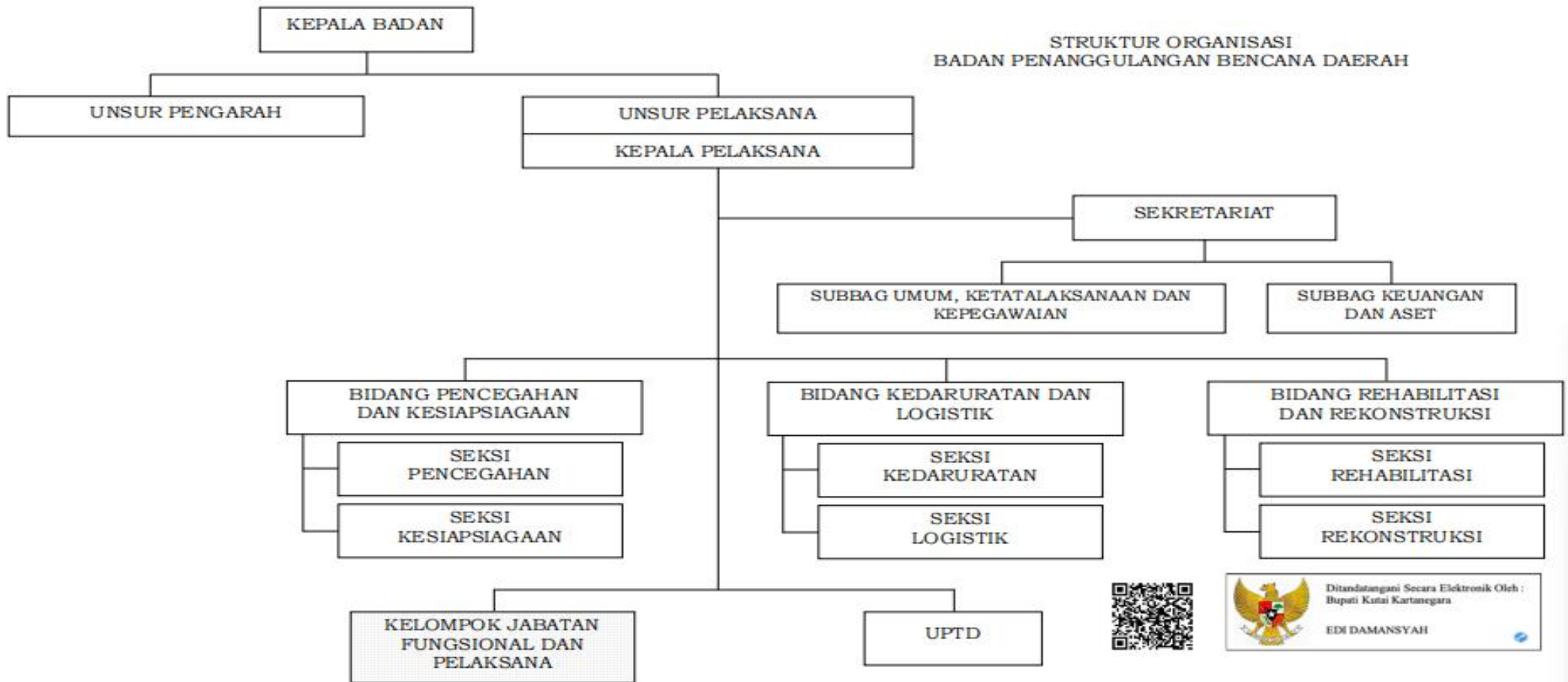
Dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara umum memiliki tugas sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga memiliki beberapa fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub bidang penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub bidang penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub bidang penanggulangan bencana;
- d. Penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub bidang penanggulangan bencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai gambar dibawah ini :

GAMBAR 2.1.1 :
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana yang ada. Adapun sumber daya manusia yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada unsur pelaksana terdiri dari Pejabat Struktural (Eselon IIB, IIIA, IIIB dan IVA) dan Pejabat Non Struktural (Fungsional Umum dan Teknis), seperti yang ditunjukkan tabel dibawah ini :

Tabel 1
Data Jumlah Pejabat Struktural Tahun 2025

No	Eselon	Jumlah (Orang)	Jabatan
1.	Eselon II/B	1	Kepala Pelaksana
2.	Eselon III/A	1	Sekretaris
3.	Eselon III/B	3	Kepala Bidang
4.	Eselon IV/A	8	Kasubbag dan Kepala Seksi
	JUMLAH	13	

Sumber Data : Subbag Umtak dan Kepegawaian BPBD, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Data Pejabat Struktural tahun 2025 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 13 Orang, yang terdiri dari Eselon II/B, Eselon III/A, Eselon III/B, dan Eselon IV/A.

Tabel 2
Data Jumlah Pejabat Fungsional Tahun 2025

No	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Analisis Sumber Daya Aparatur	1
2.	Analisis Kebencanaan	1
	JUMLAH	2

Sumber Data : Subbag Umtak dan Kepegawaian BPBD, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Data Pejabat Fungsional tahun 2025 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 2 Orang, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Aparatur dan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan.

Tabel 3
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Pangkat	Gol	Jumlah	Ket
1	Juru Muda	I/A		
2	Juru Muda Tingkat I	I/B		
3	Juru	I/C		
4	Juru Tingkat I	I/D		
5	Pengatur Muda	II/A		
6	Pengatur Muda Tingkat I	II/B		
7	Pengatur	II/C	2	
8	Pengatur Tingkat I	II/D	14	
9	Penata Muda	III/A	11	
10	Penata Muda Tingkat I	III/B	5	
11	Penata	III/C	1	
12	Penata Tingkat I	III/D	12	
13	Pembina	IV/A	5	
14	Pembina Tingkat I	IV/B		
15	Pembina Utama Muda	IV/C	1	
16	Pembina Utama Madya	IV/D		
17	Pembina Utama	IV/E		
18	PPPK	V	33	
19	PPPK	IX	20	
JUMLAH			104	

Sumber Data : Subbag Umtak dan Kepegawaian BPBD, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan tahun 2025 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 104 Orang, yang terdiri dari Pangkat Pembina Utama Muda (IV/C), Pembina (IV/A), Penata Tingkat I (III/D), Penata (III/C), Penata Muda Tingkat I (III/B), Penata Muda (III/A), Pengatur Tingkat I (II/D), Pengatur (II/C), PPPK V, dan PPPK IX.

Tabel 4
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)			
2.	Pasca Sarjana (S2)	3	2	5
3.	Sarjana (S1)	36	12	48
4.	Sarjana Muda	2		2
5.	SLTA/SMU	38	11	49
6.	SLTP			
7.	Sekolah Dasar			
JUMLAH		79	25	104

Sumber Data : Subbag Umtak dan Kepegawaian BPBD, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2025 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkisar 104 orang yang terdiri Laki-Laki dan Perempuan dengan tingkat pendidikan mulai dari Pasca Sarjana (S2), Sarjana (S1), Sarjana Muda, dan SLTA/SMU.

Tabel 5
Jumlah Pejabat Struktural

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II/B	1	-	1
2.	Eselon III/A	0	-	1
3.	Eselon III/B	3	-	3
4.	Eselon IV/A	7	1	8
JUMLAH		12	1	13

Sumber Data : Subbag Umtak dan Kepegawaian BPBD, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Pejabat Struktural dilihat dari Tingkat Pendidikan tahun 2025 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu berkisar 13 Orang, yang terdiri dari Laki-Laki dan Perempuan dengan tingkat pendidikan mulai dari Eselon II/A, Eselon III/B, dan Eselon IV/A.

Tabel 6
Jumlah Petugas Operasional telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana

No	Nama Diklat	Jumlah (Orang)	Ket.
1.	SAR MFR Dan Water Rescue	6	
2.	Jungle Rescue	11	
3.	HART Dan MFR	8	
4.	Scuba Diving And Sea Survival	2	
5.	Water Rescue Lanjutan	-	
6.	Personil DAMKAR Tingkat Dasar		
7.	Personil DAMKAR Tingkat Lanjutan		
8.	Basic Water Rescue	10	
Jumlah		37	

Sumber Data : Subbag Umtak dan Kepegawaian BPBD, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Petugas Operasional yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana tahun 2025 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu berkisar 37 Orang, yang terdiri Diklat SAR MFR dan *Water Rescue*, *Jungle Rescue*, HART dan MFR, *Scuba Diving and Sea Survival*, dan *Basic Water Rescue*.

Tabel 7

Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat dan Roda Enam

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Ket.
1.	Mercedes Benz/1525 AF /4X4 (Ziegler Damkar)	3 Buah	Baik
2.	Hino WU342R- HKMRJD3 (Damkar)	3 Buah	Baik
3.	Toyota Dyna Long XZU342R-TKMQSD3 4.00 (Damkar)	2 Buah	Baik
4.	Toyota Dyna Long 4.600 X2U342R-TKMQSD (Damkar)	2 Buah	Baik
5.	Isuzu NKR 66 (Damkar)	2 Buah	Baik
6.	Ford Ranger 4X4 2900 cc Diesel MT	2 Buah	Baik
7.	Toyota KF 60 Kijang STD Pick UP (Damkar)	1 Buah	Baik
8.	Isuzu NKR 66 4334 (Damkar)	1 Buah	Baik
9.	Mercedes Benz 700 (Damkar)	1 Buah	Baik
10.	Toyota / Innova E Standar	1 Buah	Baik
11.	NISSAN	1 Buah	Baik
12.	Ford Rangger	1 Buah	Baik
13.	Ford	1 Buah	Baik
14.	Toyota	1 Buah	Baik
15.	Isuzu	1 Buah	Baik

Sumber Data : Subbag Keuangan dan Aset BPBD, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa beberapa jumlah dan jenis sarana dan prasarana Kendaraan Roda Empat dan Roda Enam tahun 2025 yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 8**Sarana dan Prasarana berupa Peralatan/Perlengkapan**

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Tanah bangunan Pos Jaga/Menara jaga	2	Baik	
2	Mobil Roda 4	19	Baik	
3	Mobil Roda 4	3	Kurang Baik	
4	Roda 2	12	Baik	
5	Roda 2	1	Kurang Baik	
6	Mesin Compressor	1	Baik	
7	Dongkrak Mekanik	1	Baik	
8	Perkakas Bengkel Kerja Lain-Lain	1	Baik	
9	Lemari Penyimpanan	1	Baik	
10	Mesin Ketik Standar	3	Baik	
11	Mesin Hitung	1	Rusak Berat	
12	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	Kurang Baik	
13	Lemari Besi	6	Baik	
14	Rak Besi/Metal	1	Baik	
15	Filling Kayu	5	Baik	
16	Brankas	1	Baik	
17	Lemari Kayu	1	Baik	
18	Alat Penghancur Kertas	2	Baik	
19	White Board	1	Kurang Baik	
20	Alat Kantor Lainnya	3	Baik	
21	Lemari Kayu	1	Baik	
22	Meja Kayu/Rotan	1	Kurang Baik	
23	Tempat Tidur Besi	2	Baik	
24	Meja Rapat	5	Baik	
25	Kursi Rapat	101	Baik	
26	Kasur	1	Baik	
27	Kasur	14	Rusak Berat	
28	Tenda	2	Baik	
29	Sofa	2	Baik	
30	Jam Elektronik	5	Baik	
31	Lemari Es	4	Baik	
32	AC	19	Baik	
33	AC	1	Kurang Baik	
34	Kompur Gas	1	Baik	
35	Tabung Gas	1	Baik	
36	Alat Dapur lainnya	1	Rusak Berat	
37	Alat Dapur Lainnya	1	Baik	
38	Kamera Film	3	Baik	
39	Alat Hiasan	1	Baik	
40	Dispenser	1	Baik	
41	Handycam	1	Rusak Berat	
42	Handycam	1	Baik	
43	Alat Pemadam Portable	3	Baik	
44	Pompa Kebakaran	2	Baik	
45	Pipa Pemancar	16	Baik	
46	Baju Anti Panas	4	Baik	

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
47	Masker Gas	60	Baik	
48	Alat Pembantu Kebakaran	156	Baik	
49	PC / Komputer	6	Baik	
50	Notebook	10	Baik	
51	Peralatan Komputer Lainnya	1	Baik	
52	Printer	8	Baik	
53	Monitor	5	Baik	
54	Peralatan Personal Komputer	2	Baik	
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik	
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik	
59	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik	
60	Proyektor	1	Baik	
61	UPS	1	Baik	
62	Handy Talky	1	Baik	
63	Faxmili	1	Baik	
64	Alat Komunikasi Lainnya	1	Baik	
65	Alat Komunikasi Lainnya	1	Rusak Berat	
66	Alat Komunikasi Radio SSB	1	Baik	
67	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1	Baik	
68	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik	
69	Gedung Kantor Semi Permanen	1	Baik	
70	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2	Baik	
71	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1	Baik	
72	Bangunan Hidran Umum	1	Baik	
73	BCD	6	Baik	
74	Tabung Scuba	6	Baik	
75	Baju Scuba	5	Baik	
76	Regulator	6	Baik	
77	Sepatu Scuba	5	Baik	
78	Vines	6	Baik	
79	Pisau	6	Baik	
80	Masker	6	Baik	
81	Senter	6	Baik	
82	Snorkel	6	Baik	
83	Slayer	6	Baik	
84	Sarung Tangan	6	Baik	
85	Belt	6	Baik	
86	Weight 4 Kg	5	Baik	
87	Weight 2 Kg	10	Baik	
88	Selang Compressor	3	Baik	
89	Compressor	1	Baik	
90	Filter Compressor	5	Baik	
91	Minyak nabati	8	Baik	
92	Mesin Boat	3	Baik	
93	Rubber Boat	2	Baik	
94	Rubber Boat	1	Kurang Baik	
95	Speed Boat dan Mesin	1	1	
96	Tangki BBM	3	3	
97	Life Jacket	5	5	

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
98	Badan Ces	1	Kurang Baik	
99	Mesin Ces	1	Baik	
100	Tenda	2	Baik	
101	Tenda	5	Kurang Baik	
102	Tali	3	3	
103	Velm Bed	23	Baik	
104	Velm Bed	1	Kurang Baik	
105	Kantong mayat	21	21	
106	Tandu	1	1	
107	Terpal	9	9	

Sumber Data Subbag Keuangan dan Aset BPBD, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa beberapa jumlah dan jenis Sarana dan Prasarana berupa Peralatan/Perlengkapan tahun 2025 yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana				5.11	8.11	12.11	15.11	18.1	21.1	1	8.11	12.11	15.1			20%	100%	100%	100%		
Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				8.55	10.6	13.55	16.66	19.6	22.6	5.1	10.6	13.55	16.7			60%	100%	100%	100%		
Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%		

Hasil dari capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didapatkan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi E-Pantau Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 60% disebabkan pada saat tahun 2021 masih wabah Pandemi COVID 19 dan terbatasnya sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung ke masyarakat serta belum tersedianya sumber daya manusia pusdalops penanggulangan bencana yang memadai, tetapi secara rata-rata realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar $76\% \leq 90\%$. dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja TINGGI.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

URAIAN (1)	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2025 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)	2025 (11)	2021 (12)	2022 (13)	2023 (14)	2024 (15)	2025 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,961,643,197.00	3,068,787,520.00	22,321,360,690.00	37,950,940,417.00	34,117,885,743.00	13,726,018,641.00	17%	100%	104%	86%	86%	15,961,643,197.00	13,726,018,641.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	617,520,800.00		417,195,300.00	587,088,233.00	690,778,663.00	593,262,361.00	0%	99%	94%	92%	96%	617,520,800.00	593,262,361.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	253,898,000.00		197,637,400.00	289,564,500	460,367,900.00	251,899,664.00	0%	99%	97%	92%	99%	253,898,000.00	251,899,664.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36,068,000.00		84,642,900.00	174,093,733	144,586,128.00	35,941,663.00	0%	100%	99%	96%	100%	36,068,000.00	35,941,663.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,712,000.00		134,915,000.00	123,430,000	85,824,635.00	83,629,148.00	0%	98%	82%	86%	87%	95,712,000.00	83,629,148.00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	33,488,000.00					28,896,600.00					86%	33,488,000.00	28,896,600.00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	163,874,000.00					163,765,286.00					100%	163,874,000.00	163,765,286.00
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,480,800.00					29,130,000.00					84%	34,480,800.00	29,130,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,097,374,770.00		12,250,994,235.00	12,453,907,394.00	7,675,953,872.00	8,724,428,270.00	0%	94%	93%	79%	86%	10,097,374,770.00	8,724,428,270.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,690,660,770.00		11,799,978,335.00	12,114,126,084	7,254,179,872.00	8,380,812,872.00	0%	94%	94%	79%	86%	9,690,660,770.00	8,380,812,872.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61,016,000.00		73,151,500.00	74,232,220	63,557,000.00	31,877,398.00	0%	97%	86%	74%	52%	61,016,000.00	31,877,398.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					33,250,800.00						#DIV/0!		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	310,000,000.00		377,864,400.00	265,549,090	324,966,200.00	277,077,000.00	0%	97%	79%	90%	89%	310,000,000.00	277,077,000.00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1,086,443,000.00			220,990,080.00		100%						
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35,698,000.00					34,661,000.00					97%	35,698,000.00	34,661,000.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	131,650,000.00		-	171,963,220.00	774,924,909.00	114,723,850.00			96%	344%	87%	131,650,000.00	114,723,850.00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				171,963,220.00	774,924,909.00				96%	344%			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000.00					19,598,700.00					78%	25,000,000.00	19,598,700.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,000,000.00					25,299,150.00					84%	30,000,000.00	25,299,150.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	76,650,000.00					69,826,000.00					91%	76,650,000.00	69,826,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		74,981,000.00	288,022,600.00	1,902,525,980.00	1,322,688,937.00	0.00	100%	96%	95%	136%			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			192,668,600.00	1,542,750,000.00	33,867,920.00			96%	99%	7%			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				127,715,120.00	79,318,163.00				85%	106%			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan				148,759,920.00	61,116,312.00				99%	41%			
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				57,383,500.00	105,212,514.00				80%	105%			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		74,981,000.00	95,354,000.00	25,917,440.00	1,043,174,028.00		100%	96%	39%	695%			

URAIAN	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	642,315,800.00	642,875,696.00	1,192,385,193.00	1,210,298,450.00	20,523,189,981.00	605,423,970.00	94%	93%	87%	1768%	94%	642,315,800.00	605,423,970.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000.00		10,500,000.00	87,142,000.00	99,995,500.00	14,915,520.00	0%	100%	97%	952%	99%	15,000,000.00	14,915,520.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,000,000.00	55,000,000.00	209,242,770.00	208,880,250.00	64,139,200.00	108,637,150.00	100%	100%	98%	64%	99%	110,000,000.00	108,637,150.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75,000,000.00		49,840,000.00	28,673,500.00	99,773,500.00	74,908,000.00		100%	98%	153%	100%	75,000,000.00	74,908,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000.00	89,464,000.00	77,627,000.00	121,814,000.00	74,925,000.00	99,262,000.00	89%	62%	87%	75%	99%	100,000,000.00	99,262,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		34,928,000.00	69,980,000.00	63,788,700.00	99,802,249.00		100%	100%	85%	117%			
Penyediaan Bahan/Material	100,000,000.00				467,792,079.00	99,288,500.00				468%	99%	100,000,000.00	99,288,500.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,646,200.00	356,935,622.00	690,537,423.00	550,000,000.00	67,436,500.00	124,289,200.00	100%	98%	100%	12%	81%	153,646,200.00	124,289,200.00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	66,219,600.00	66,988,074.00	48,358,000.00	75,000,000.00	58,810,000.00	64,173,600.00	89%	88%	33%	78%	97%	66,219,600.00	64,173,600.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22,450,000.00	39,560,000.00	36,300,000.00	75,000,000.00	19,490,515,953.00	19,950,000.00	79%	73%	100%	25987%	89%	22,450,000.00	19,950,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	965,446,817.00	2,350,930,824.00	2,650,531,080.00	14,796,721,830.00	18,750,202,695.00	432,923,793.00	159%	97%	96%	95%	45%	965,446,817.00	432,923,793.00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1,385,484,007.00		9,827,120,739.00	340,750,500.00		93%		98%	100%			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		965,446,817.00		4,627,499,091.00	4,650,077,945.00				100%	98%			
Pengadaan Mebel	17,439,800.00			342,102,000.00	744,461,000.00	15,690,000.00			66%	99%	90%	17,439,800.00	15,690,000.00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya					11,754,955,908.00				100%	#DIV/0!			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	594,928,917.00		2,197,317,950.00		1,252,757,342.00	350,414,393.00		97%		60%	59%	594,928,917.00	350,414,393.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	353,078,100.00		453,213,130.00		7,200,000.00	66,819,400.00		99%		96%		353,078,100.00	66,819,400.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,507,335,010.00	-	4,334,574,355.00	3,300,421,750.00	6,196,215,365.00	1,320,904,079.00	0%	96%	90%	89%	88%	1,507,335,010.00	1,320,904,079.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000.00		4,940,000.00		1,176,245,044.00	7,500,000.00		99%		61%	100%	7,500,000.00	7,500,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260,083,900.00		225,361,566.00	219,587,679.00	2,968,790,896.00	177,568,050.00	0%	62%	63%	99%	68%	260,083,900.00	177,568,050.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,239,751,110.00		4,104,272,789.00	3,080,834,071.00	2,051,179,425.00	1,135,836,029.00	0%	99%	92%	99%	92%	1,239,751,110.00	1,135,836,029.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,000,000,000.00	-	1,187,657,927.00	3,528,013,560.00	6,583,206,903.00	1,934,352,318.00	0%	98%	96%	220%	97%	2,000,000,000.00	1,934,352,318.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,525,000,000.00		871,066,127.00	2,178,028,922.00	840,278,611.00	1,461,695,850.00	0%	100%	98%	41%	96%	1,525,000,000.00	1,461,695,850.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175,000,000.00		74,400,000.00	103,275,000.00	5,582,152,472.00	172,986,500.00	0%	98%	59%	6978%	99%	175,000,000.00	172,986,500.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300,000,000.00		242,191,800.00	1,246,709,638.00	160,775,820.00	299,669,968.00	0%	95%	98%	19%	100%	300,000,000.00	299,669,968.00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3,019,394,500.00	1,507,652,330.00	4,052,989,236.00	4,416,467,450.00	8,164,317,172.00	2,094,891,133.00	85%	77%	73%	67%	69%	3,019,394,600.00	2,094,891,133.00
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	361,212,400.00		555,529,781.00	1,457,927,689.00	140,003,150.00	252,716,180.00		79%	66%	55%	70%	361,212,400.00	252,716,180.00
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	126,541,800.00		555,529,781.00	1,457,927,689.00	140,003,150.00	91,929,000.00		79%	66%	55%	73%	126,541,800.00	91,929,000.00
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	234,670,600.00					160,787,180.00					69%	234,670,600.00	160,787,180.00
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,070,602,000.00	579,305,776.00	958,950,382.00	1,398,224,409.00	4,558,173,437.00	686,946,802.00	100%	85%	80%	191%	64%	1,070,602,000.00	686,946,802.00
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		470,525,776.00			367,334,632.00		100%						
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	126,130,800.00					7,260,000.00					6%	126,130,800.00	7,260,000.00
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	233,614,200.00		247,064,000.00	699,899,995.00	204,411,631	207,547,631.00		97%	78%	31%	89%	233,614,200.00	207,547,631.00

URAIAN	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	126,130,800.00					7,260,000.00					6%	126,130,800.00	7,260,000.00
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	233,614,200.00		247,064,000.00	699,899,995.00	204,411,631	207,547,631.00		97%	78%	31%	89%	233,614,200.00	207,547,631.00
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	132,560,200.00		25,174,480.00	149,305,600.00	142,549,240.00	52,359,000.00		100%	100%	95%	39%	132,560,200.00	52,359,000.00
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	265,541,200.00		157,411,240.00	146,130,215.00	476,254,000.00	255,696,120.00		90%	97%	266%	96%	265,541,200.00	255,696,120.00
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	113,184,000.00		197,957,382.00	129,458,955.00	139,464,000.00	67,291,520.00		99%	86%	91%	59%	113,184,000.00	67,291,520.00
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		108,780,000.00	94,905,000.00	104,820,524.00	3,102,942,257.00		98%	53%	70%				
Penyusunan Rencana Kortijensi			236,438,280.00	168,609,120.00	51,265,600.00			79%	67%	7%			
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100,000,000.00				73,952,077.00	48,393,011.00				74%	48%	100,000,000.00	48,393,011.00
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	99,571,600.00					48,399,520.00					49%	99,571,600.00	48,399,520.00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,119,335,500.00	928,346,554.00	1,300,602,750.00	1,359,451,210.00	3,092,833,602.00	762,459,177.00	93%	84%	85%	35%	68%	1,119,335,600.00	762,459,177.00
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	73,823,400.00		14,524,000.00	92,090,980.00	2,215,542,579.00	20,568,218.00		29%	92%	1477%	28%	22,692,000.00	20,568,218.00
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	74,571,600.00		148,673,020.00	140,419,085.00	-	23,968,609.00		99%	94%	0%	32%	54,571,600.00	23,968,609.00
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	290,205,500.00	414,548,200	373,055,840.00	394,878,285.00	96,925,000.00	290,635,160.00	95%	83%	99%	22%	100%	340,091,800.00	290,635,160.00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	100,000,000.00					21,740,850.00					22%	50,113,800.00	21,740,850.00
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	480,735,000.00	513,798,354	595,019,840.00	628,943,510.00	619,968,073.00	373,418,640.00	91%	99%	84%	8%	78%	551,866,400.00	373,418,640.00
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100,000,000.00		97,993,050.00	88,466,900.00	93,868,700.00	32,127,700.00		98%	88%	63%	32%	100,000,000.00	32,127,700.00
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit			71,337,000.00	14,652,450.00	66,529,250.00			36%	15%	67%	m		
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	468,244,600.00	-	1,237,906,323.00	200,864,142.00	373,306,983.00	392,768,974.00	0%	67%	40%	50%	84%	468,244,600.00	392,768,974.00
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	83,802,400.00		222,916,100.00	49,459,152.00	57,736,900.00	81,564,150.00		53%	62%	38%	97%	83,802,400.00	81,564,150.00
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	70,681,000.00		196,441,900.00	23,090,750.00	58,852,783.00	53,675,000.00	0%	72%	29%	59%	76%	70,681,000.00	53,675,000.00
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	48,425,200.00		146,020,000.00	60,520,000.00	200,830,400.00	46,112,000.00		54%	76%	201%	95%	48,425,200.00	46,112,000.00
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi			577,927,050.00	6,120,000.00	55,886,900.00	0.00		77%	5%	37%			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			94,601,273.00	61,674,240.00		0.00		63%	47%				
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	97,368,600.00					84,245,644.00					87%	97,368,600.00	84,245,644.00
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	97,538,800.00				83,186,400.00	67,425,180.00				55%	69%	97,538,800.00	67,425,180.00
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	70,428,600.00					59,747,000.00					85%		

Secara rata-rata realisasi anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar $66\% \leq 75\%$. dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SEDANG.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Sub Urusan Bencana. Untuk Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Ke depan, perlu untuk menerjemahkan dan mengintegrasikan SPM ke dalam Renstra dan Renja terutama bagi OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar dan melaksanakan Evaluasi Capaian SPM secara berkala. Capaian pelaksanaan SPM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan
Masyarakat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0.17	3.7	78.21	100	56.26
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	3.06	100	49.22	100	52.44
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	100	89.7
Nilai Rata-Rata Capaian SPM			34.41	67.9	75.81	100	66.13
			68.85				

Secara rata-rata realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebesar 68.85%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang menjadi fokus penerima manfaat dari kegiatan dan layanan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka penanggulangan bencana di daerah. Berikut penjelasan rinci mengenai kelompok sasaran layanan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

1. Masyarakat Umum

Kelompok ini merupakan sasaran utama dari seluruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terutama yang berkaitan dengan:

- a. Sosialisasi dan edukasi kebencanaan (peningkatan kesiapsiagaan).

- b. Pelatihan tanggap darurat dan mitigasi bencana.
- c. Layanan evakuasi, penyelamatan, dan bantuan pascabencana.
- d. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Contoh: masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau kebakaran hutan.

2. Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa/Kelurahan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perangkat desa dalam:

- a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana.
- b. Pembentukan dan pelatihan Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana).
- c. Koordinasi penyaluran bantuan dan logistik.
- d. Penentuan kebijakan tanggap darurat di tingkat lokal.

4. Kelompok Rentan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberi perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana, seperti:

- a. Anak-anak dan lansia.
- b. Penyandang disabilitas.
- c. Ibu hamil dan menyusui.
- d. Masyarakat miskin di wilayah rawan bencana.

Layanan meliputi evakuasi prioritas, bantuan logistik khusus, dan tempat pengungsian yang ramah kelompok rentan.

5. Lembaga Pendidikan

Sekolah dan perguruan tinggi sering menjadi sasaran layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk:

- a. Edukasi kesiapsiagaan bencana (misalnya program Sekolah/Madrasah Aman Bencana).
- b. Simulasi evakuasi dan pelatihan tanggap darurat.
- c. Penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kebencanaan.

6. Dunia Usaha dan Industri

Sasaran layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan sektor swasta atau bekerja sama dengan Dunia Usaha dan Industri, dalam hal :

- a. Penguatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang kebencanaan.
- b. Penanggulangan bencana di kawasan industri.
- c. Bantuan logistik dan sumber daya saat bencana terjadi.

Adapun berikut ini adalah ringkasan dari Kelompok Sasaran :

Kelompok Sasaran	Jenis Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Masyarakat Umum	Edukasi, Penanganan Bencana, Evakuasi, Bantuan Darurat, Rehabilitasi
Pemerintah Daerah/Desa	Koordinasi, Perencanaan, Pelatihan
Lembaga/Organisasi Kebencanaan	Dukungan Operasional, Koordinasi
Kelompok Rentan	Perlindungan dan Prioritas Bantuan
Lembaga Pendidikan	Edukasi, Simulasi, Penelitian
Dunia Usaha	Mitra Bantuan dan Kesiapsiagaan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beberapa mitra perangkat dalam pemberian pelayanan. Mitra-mitra tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Bentuk mitra pada BNPB disini berupa koordinasi teknis, pendanaan program mitigasi besar, pelatihan dan dukungan logistik saat bencana besar. Adapun contoh nyata terhadap mitra yang dilakukan adalah adanya laporan BNPB mengutip data penanganan banjir di Kutai Kartanegara dan koordinasi respons yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat.

2. TNI, Polri, Basarnas dan Satuan Pemerintah Daerah (Satpol PP, Damkar)

Bentuk mitra pada lembaga-lembaga ini antara lain adanya operasi darurat (evakuasi, penyelamatan), pengamanan lokasi, dukungan logistik dan rekayasa teknis pada lokasi terdampak. Kerja sama lintas instansi juga sering diwujudkan dalam simulasi dan operasi gabungan.

3. Dinas Sosial

Bentuk mitra pada Dinas Sosial disini difokuskan ke dalam penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Adapun pelayanan yang diberikan antara lain berupa bantuan logistik, kebutuhan dasar pengungsi, layanan psikososial, serta penanganan pengungsian.

4. Dinas Kesehatan

Bentuk mitra pada Dinas Kesehatan disini berfokus ke dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan darurat bagi korban bencana. Adapun pelayanannya meliputi kegiatan penanganan medis darurat, pembentukan pos kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit pascabencana, serta pemulihan layanan kesehatan dasar.

5. Dinas Pekerjaan Umum

Bentuk mitra pada Dinas Pekerjaan Umum disini adalah sebagai penanganan dan pemulihan infrastruktur terdampak bencana. Adapun pelayanan yang ditujukan disini meliputi

perbaikan darurat infrastruktur, pembukaan akses wilayah terdampak, serta dukungan teknis dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

6. LSM / Organisasi Masyarakat Sipil & Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Bentuk mitra pada lembaga-lembaga ini antara lain yaitu adanya tindakan advokasi, pelatihan komunitas, pendampingan mitigasi risiko berbasis masyarakat, pembentukan forum PRB yang menggabungkan pemerintah, akademisi, dan dunia usaha. Forum PRB Kukar dibentuk untuk menjadi mitra aktif pemerintah daerah.

7. Palang Merah Indonesia (PMI)

Bentuk mitra pada Palang Merah Indonesia (PMI) antara lain adalah mitra layanan kemanusiaan seperti kegiatan donor darah, bantuan medis darurat, jaringan relawan untuk distribusi bantuan dan pertolongan pertama.

8. BAZNAS, Organisasi Keagamaan, Filantropi Lokal

Bentuk mitra pada lembaga-lembaga ini antara lain adalah adanya sumber pendanaan alternatif (ZIS), bantuan pemulihan kebutuhan korban, koordinasi bantuan sosial pascabencana.

2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berikut adalah beberapa kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara :

1. Kerja Sama Antar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Daerah Berbatasan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kerja sama formal dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah lain untuk penanggulangan bencana di wilayah yang berbatasan. Kerja sama ini berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan bencana bersama,

yang bertujuan memperkuat koordinasi respons dan sinergi tanggap darurat antara kedua daerah. Adapun berikut adalah beberapa daerah yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a) BPBD Penajam Paser Utara
- b) BPBD Kutai Timur
- c) BPBD Balikpapan
- d) BPBD Samarinda
- e) BPBD Bontang
- f) Polda Kalimantan Timur
- g) Komando Distrik Militer
- h) Kodim Tenggarong
- i) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- j) LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- k) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

2. Kerja Sama Internal dengan Perangkat Daerah Lain di Kukar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menjalin kerja sama dengan beberapa perangkat daerah lain di lingkungan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas kesehatan, dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Tujuan kerja sama ini adalah membentuk keluarga dan masyarakat yang sadar risiko bencana, tangguh dalam menghadapi bencana, serta berperan aktif dalam mitigasi dan tanggap darurat.

3. Kerja Sama dengan Lembaga Keagamaan (BAZNAS)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kukar dan BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara menandatangani kerja sama untuk :

- a) Optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk kegiatan penanggulangan bencana.
- b) Pengelolaan dana sosial keagamaan agar mendukung program Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara transparan dan terkoordinasi.

4. Kerja Sama Perencanaan di Tingkat Nasional/Internasional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kukar juga terlibat rencana kerja sama dengan pihak eksternal seperti Tim IKN (Ibu Kota Negara) terkait penanggulangan bencana lingkungan. Kunjungan dan pembicaraan awal dengan Tim IKN menandai rencana kolaborasi strategis untuk mengurangi risiko bencana di wilayah IKN serta berbagi praktik baik penanggulangan bencana.

5. Tanggung Jawab Kerja Sama Menurut Kebijakan Daerah

Sebagai perangkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kukar memiliki tugas dan kewajiban untuk:

- a) Mengembangkan kerja sama internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan daerah dan rencana penanggulangan bencana.
- b) Bekerja bersama OPD lain, organisasi masyarakat, lembaga profesional, dan pemangku kepentingan lokal.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mensyaratkan koordinasi lintas sektor untuk menjalankan penanggulangan bencana secara efektif.

6. Implementasi Kolaboratif di Lapangan

Kerja sama ini tidak hanya formal, tetapi juga terlihat dalam aksi nyata, misalnya:

- a) Pendampingan dan dukungan bersama pemerintah kecamatan/kelurahan dan relawan saat pendistribusian bantuan logistik untuk korban kebakaran permukiman di Kukar.
- b) Pelibatan instansi lain (Dinsos, Damkar, Satpol PP) dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk membangun kolaborasi kapasitas Kabupaten Kukar.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah rawan akan bencana. Hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Kondisi ini semakin membahayakan jika praktik-praktik sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan. Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya dapat bekerja secara profesional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kutai Kartanegara. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah karena yang akan merasakan dampaknya nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah partisipasi masyarakat, agar partisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor yang sebelumnya

bernama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala penanggulangan bencana di daerah.

Serta proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal. Terdapat pula beberapa hal terkait dengan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui bahwa konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali menjadi hal yang bertolak belakang. Meski memberikan keuntungan ekonomi yang besar namun ternyata eksplorasi telah mengubah derajat kualitas sumber daya alam. Dampak langsung kegiatan pertambangan diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, dan kerusakan hutan hingga sedimentasi tanah.

Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dapat meminimalisasi resiko bencana baik secara langsung atau tidak langsung ke masyarakat.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 10
Permasalahan Perangkat Daerah

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Belum maksimal	Layanan Informasi Rawan bencana belum optimal	1. Layanan Informasi Rawan Bencana Belum Optimal	1. Sosialisasi Informasi rawan bencana masih kurang
			2. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi.
			3. Belum semua daerah rawan bencana terpasang rambu Informasi Bencana
			4. Kondisi luas wilayah
			5. Terbatasnya sarpras layanan informasi penanggulangan bencana
Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan belum optimal	Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Belum Optimal	2. Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Belum Optimal	6. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah
			7. Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS) di semua wilayah rawan bencana

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
			8. Keterbatasan Peralatan Kesiapsiagan dan penyelamatan petugas dan masyarakat
			9. Belum terlaksananya simulasi Rencana Kontinjensi (Renkon)
			10. Belum optimalnya peningkatan kapasitas Desa/kelurahan tangguh bencana
			11. Belum optimalnya koordinasi layanan infrastruktur mitigasi bencana
	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Belum Optimal	3. Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Belum Optimal	12. Kurangnya Peran Serta Eksternal BPBD (Penthahelix) Dalam Penanganan Pada Saat Kejadian Bencana
			13. Belum terbangunnya Sistem Informasi Kebencanaan di daerah
			14. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Internal dan Eksternal dalam penanggulangan kedaruratan bencana
			15. Belum optimalnya Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi mitra dalam penanggulangan bencana

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
	Pelaksanaan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal	4. Pelaksanaan Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Belum Optimal	16. Ketebatasan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
			17. Belum optimalnya kerja sama pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, akademisi dan masyarakat (pentahelix) terkait penanggulangan bencana kabupaten/kota
			18. Belum optimalnya kerja Tim Jitupasna lintas OPD terkait penanganan pasca bencana
			19. Belum optimalnya Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) di Desa dan Kelurahan Sehingga Komunikasi Lintas Lembaga Tidak Optimal
			20. Terbatasnya bantuan Stimulan oleh OPD terkait
			21. Belum diimplimentasikannya tata ruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Perubahan iklim global berdampak nyata dan semakin terasa terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kenaikan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan, menjadi ancaman serius bagi ketahanan wilayah ini.

Aktivitas pertambangan, deforestasi, serta alih fungsi lahan yang masih memperburuk daya dukung lingkungan dan mempercepat laju kerusakan ekosistem lokal. Dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas pertanian dan perikanan masyarakat, tetapi juga berisiko terhadap ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, serta kelangsungan pembangunan ekonomi secara umum.

Selain itu, Kutai Kartanegara sebagai wilayah yang terletak di jalur sungai besar dan memiliki kawasan pesisir, turut menghadapi risiko peningkatan permukaan air laut dan erosi pantai akibat perubahan iklim global. Ketahanan infrastruktur dasar terhadap bencana hidrometeorologi masih terbatas, sehingga kerentanan masyarakat semakin tinggi, terutama di wilayah perdesaan.

Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terpadu, seperti rehabilitasi hutan, pengendalian emisi karbon, tata ruang berbasis risiko bencana, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Investasi dalam pendidikan lingkungan dan penguatan kapasitas masyarakat lokal juga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks dan berdampak lintas sektor.

Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dalam Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan Risiko Bencana: BPBD memiliki kewenangan untuk mengelola risiko bencana di daerah, termasuk identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko.	Layanan Informasi Rawan Bencana Belum Optimal	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran, Hutan dan lahan, Tanah Longsor)	Dampak Perubahan Iklim Global	Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan	Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana
Penanganan Darurat Bencana: BPBD memiliki kewenangan untuk menangani situasi darurat bencana, termasuk evakuasi, penyelamatan, dan pemberian bantuan.	Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Belum Optimal					Belum optimalnya kesiapsiagaan, tanggap bencana yang terintegrasi antar perangkat daerah, masyarakat di wilayah rawan bencana
Koordinasi dan Kerjasama: BPBD memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana.	Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Belum Optimal					
	Pelaksanaan Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Belum Optimal					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun, yaitu : **KUKAR IDAMAN TERBAIK, “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Dalam visi ini terkandung tiga rumusan pokok yang menjadi satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Maju

Pokok visi ini berfokus pada peningkatan sektor ekonomi, infrastruktur dan tata kelola. Pemerintah Daerah berupaya menciptakan perekonomian yang inklusif dengan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan.

Dengan mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan investasi, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat secara merata, sehingga akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong terciptanya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Kutai Kartanegara telah memfokuskan diri untuk memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki. Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga diimbangi dengan penguatan infrastruktur daerah seperti penyediaan akses jalan dan penataan ruang yang baik sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, birokrasi pemerintahan sebagai penanggung jawab pembangunan daerah juga menjadi perhatian agar tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

2. Sejahtera

Pokok visi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang dilandasi dengan budaya kearifan lokal. Pokok visi “sejahtera” juga diwujudkan dengan pengembangan SDM melalui penguatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta penyediaan hunian yang layak, sehingga tercipta kondisi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sehat, berdaya saing, dan memiliki karakter budaya yang kuat.

3. Berkelanjutan

Kutai Kartanegara yang diproyeksikan menjadi kawasan industri hijau harus mengedepankan prinsip berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup sebagai dasar bagi pembangunan jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen menerapkan praktik ramah lingkungan melalui pengembangan industri hijau, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang

bertanggung jawab. Program rehabilitasi lahan kritis, pelestarian hutan, dan mitigasi perubahan iklim menjadi prioritas penting dalam menjaga ekosistem.

Dari Ketiga rumusan pokok visi ini yang berhubungan dengan Tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu **Berkelanjutan.**

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025- 2029, misi pembangunan sebagai berikut :

1) MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Misi ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diarahkan tidak hanya pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga pada pemerataan akses di seluruh wilayah

2) MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif.

Misi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan.

3) MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah.

4) MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

Pendidikan karakter merupakan modal penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pendidikan karakter masyarakat yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi kelestarian lingkungan untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat dengan lingkungan.

5) MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Misi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun wilayah secara menyeluruh dan merata, dengan mengedepankan prinsip keadilan spasial dan pemerataan akses terhadap sumber daya pembangunan.

Dari 5 Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berhubungan dengan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah **Misi 4 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.**

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan - pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tujuan **Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah** dengan Indikator tujuan **Indeks Ketahanan Daerah.**

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah dari yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai sasaran Strategis Perangkat Daerah **Meningkatnya layanan pencegahan dan perlindungan korban bencana** dengan Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah yaitu **Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana.**

3.3 Strategi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi “Kukar Idaman Terbaik” serta memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan arah kebijakan strategis untuk periode 2025–2029. Fokus utama diarahkan pada peningkatan

kesiapsiagaan daerah terhadap berbagai potensi ancaman bencana melalui penguatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, sistem informasi, serta layanan perlindungan masyarakat terdampak bencana.

Dalam menyelaraskan Arah Kebijakan sesuai RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2025 - 2029 yaitu Penerapan Sistem Peringatan Dini di Daerah Rawan Bencana, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan strategis sebagai berikut :

1. **Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM** dalam pengelolaan sistem peringatan dini berbasis data risiko bencana.
2. **Pengembangan infrastruktur teknologi peringatan dini**, seperti sirine, sensor banjir, dan sistem informasi berbasis daring.
3. **Integrasi data dan sistem peringatan dini** antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BMKG, dan instansi terkait lainnya.
4. **Peningkatan partisipasi masyarakat** dalam pemantauan, penyebarluasan informasi, dan respons cepat terhadap peringatan dini.
5. **Penyusunan SOP dan simulasi berkala** dalam pelaksanaan peringatan dini di daerah rawan bencana.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pelayanan Informasi rawan Bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah		Indeks Ketahanan Daerah	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	Tujuan dan Indikator Perangkat daerah
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		Meningkatnya layanan pencegahan dan perlindungan korban bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Bencana	80	82	84	86	88	90	Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Dengan mendukung pelaksanaan strategis tersebut, maka arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dilakukan :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana daerah.
2. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.
3. Pembangunan dan optimalisasi infrastruktur serta sarana prasarana kesiapsiagaan.
4. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi bencana berbasis teknologi digital.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana, terutama bagi masyarakat rentan dan korban terdampak.
6. Penguatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha serta organisasi sosial dalam PRB.
7. Pemantapan mekanisme pendanaan dan logistik bencana secara berkelanjutan.

Tahapan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029, mengacu pada prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 - 2029, seperti pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026 1	Tahap II 2027 2	Tahap III 2028 3	Tahap IV 2029 4	Tahap V 2030 5
Penguatan Infrastruktur Kesiapsiagaan dan Respons Bencana , meliputi pembangunan gudang logistik, serta pusat data dan informasi kebencanaan di tingkat kabupaten dan kecamatan.	Pemerataan Infrastruktur Kebencanaan: pembangunan posko, jalur evakuasi, dan gudang logistik di wilayah berisiko tinggi.	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana : memastikan seluruh sarana kebencanaan berfungsi sesuai kebutuhan wilayah dan masyarakat.	Integrasi Pembangunan Kebencanaan ke dalam Pembangunan Daerah: menyatukan arah kebijakan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dengan rencana pembangunan wilayah dan sektor.	Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Penanggulangan Bencana: memastikan efektivitas koordinasi lintas sektor, kesiapan SDM, serta pembiayaan kebencanaan yang berkelanjutan.
Penataan dan Penguatan Kelembagaan BPBD , melalui penyempurnaan struktur organisasi, peningkatan kompetensi SDM, serta penerapan standar operasional penanggulangan bencana.	Penguatan Kapasitas Wilayah: pelatihan relawan dan aparat kecamatan/desa dalam penanganan bencana.	Efisiensi Kelembagaan: penyempurnaan mekanisme koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga penanggulangan bencana.	Pemantapan Sistem dan Tata Kelola Kebencanaan: meningkatkan efektivitas manajemen risiko bencana berbasis data dan inovasi.	Akselerasi Inovasi dan Teknologi Kebencanaan: memperluas penggunaan teknologi digital, sistem peringatan dini, serta analitik risiko untuk mendukung respons cepat.
Pemantapan Koordinasi dan Kolaborasi , dengan pemerintah provinsi, BNPB, TNI, Polri, dunia usaha, serta masyarakat melalui forum PRB dan jejaring relawan.	Transformasi Sistem Informasi: pengembangan sistem data spasial risiko bencana yang terintegrasi dengan perangkat daerah.	Pemanfaatan Teknologi Informasi: penguatan sistem digitalisasi data, informasi, dan logistik kebencanaan.	Kolaborasi Multipihak: memperkuat kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, dan dengan dunia usaha dalam pengurangan risiko bencana.	Integrasi Pembangunan Tangguh Bencana: memasukkan indikator ketahanan bencana ke dalam perencanaan pembangunan lintas sektor.
	Kolaborasi Lintas Wilayah: mendorong sinergi antar kecamatan dalam pengelolaan sumber daya kebencanaan.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat: mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan.	Pemantapan Ketahanan Wilayah: memperluas penerapan pembangunan infrastruktur dan sosial yang tangguh terhadap ancaman bencana.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Dunia Usaha: memperluas kolaborasi dengan komunitas, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam pengurangan risiko bencana.
	Pengarusutamaan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dalam rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan.	Evaluasi dan Perbaiki Sistem Pembangunan Kebencanaan: memperkuat monitoring, evaluasi, dan pembelajaran dari praktik terbaik.	Transformasi Digital dan Inovasi Kebencanaan: mempercepat penggunaan teknologi cerdas dan sistem informasi dalam mendukung Kukar sebagai daerah tangguh bencana.	Penguatan Evaluasi dan Pembelajaran Pembangunan Kebencanaan: membangun sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kebijakan dan strategi daerah.

Tabel 3.5**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

No	Operasionalisasi NSPK/Sasaran	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Penerapan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana	1.Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana daerah. 2.Penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana. 3.Pembangunan dan optimalisasi infrastruktur serta sarana prasarana kesiapsiagaan. 4.Pengembangan sistem informasi dan komunikasi bencana berbasis teknologi digital. 5.Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana, terutama bagi masyarakat rentan dan korban terdampak. 6.Penguatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha serta organisasi sosial dalam PRB. 7.Pemantapan mekanisme pendanaan dan logistik bencana secara berkelanjutan.	

BAB IV
PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN,DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Untuk mencapai sasaran strategis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan beberapa program utama untuk dilaksanakan pada periode Ranwal Renstra 2025 – 2029. Adapun rencana program utama yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan tujuan dan sasarannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Rancangan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana (Utama)

4.2 Uraian Kegiatan

Untuk mencapai program, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan kegiatan tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, dan program pada Pembangunan daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Rancangan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi.

Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota
10. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
11. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
12. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Tabel 4.2

Teknik merumuskan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah				Indeks Ketahanan Daerah		
		Meningkatnya layanan pencegahan dan perlindungan korban bencana			Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana		
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien (BPBD)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersusunnya laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan SDM	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersusunnya laporan Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Jumlah laporan Sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana		
				Tersusunnya laporan pelaksanaan layanan informasi rawan bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Kegiatan Layanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
				Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	
				Tersusunnya laporan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	
				Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
				Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
				Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
				Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/ Kota	
				Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidem/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidem/Wabah Penyakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
				Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

4.3 Uraian Sub Kegiatan

Untuk mencapai kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sub kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Pembangunan daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Rancangan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rancangan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD
14. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
15. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
16. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
17. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
19. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

21. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor
24. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
26. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
28. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
29. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30. Pengadaan Mebel
31. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
32. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
33. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
37. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
38. Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
39. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
40. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota
41. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
42. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
43. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
44. Penyusunan Rencana Kontijensi
45. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
46. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
47. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
48. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

49. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
50. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
51. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
52. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
53. Penanganan Pasca Bencana Provinsi
54. Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
55. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi
56. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi
57. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
58. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
59. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
60. Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Tujuan : Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.52	0.54		0.56		0.58		0.60		0.62		0.64			
Sasaran : Meningkatnya layanan pencegahan dan perlindungan korban bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	NA	80	21,443,226,958.00	82	24,447,757,748.00	84	23,800,200,610.72	86	25,385,763,004.30	88	28,564,517,761.09	90	31,086,952,743.45		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA																	
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien (BPED)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	64.62	72.50	17,866,821,058	72.52	20,282,757,748	72.54	18,439,450,293	72.56	18,950,763,004	72.58	22,231,210,306	72.60	24,801,952,743		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Meningkatnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Dokumen	12	13	674,720,800	13	700,000,000	13	1,050,000,000	13	1,075,000,000	13	1,075,000,000	13	1,075,000,000		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	303,898,000	6	450,000,000	6	350,000,000	6	350,000,000	6	350,000,000	6	350,000,000		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	2	102,912,000	4	150,000,000	7	500,000,000	7	500,000,000	7	500,000,000	7	500,000,000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	33,488,000	1	100,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	1	34.480.800			1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	8.604.105.883	12	11.696.450.293,00	13	11.736.450.292,72	15	12.017.763.004,30	15	14.735.710.306,09	15	16.423.952.743,45	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	700	700	8.115.191.883	735	11.256.450.293	1.272	11.256.450.292,72	1.272	11.537.763.004,30	1.272	14.105.710.306	1.272	15.793.952.743,45	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	61.016.000											
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	25.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	12	360.000.000	12	360.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan		6	42.898.000	4	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	7	14	130.650.000	13	275.000.000	6	225.000.000	7	275.000.000	7	275.000.000	7	275.000.000		
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6	75.650.000	12	250.000.000	5	200.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan SDM	Orang			-	125	280.000.000	100	800.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	750.000.000		
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket				125	180.000.000	150	500.000.000					150	450.000.000		
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang						50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000		
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				15	100.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	120	120	1.120.500.000	100	700.000.000	9	1.170.500.000	9	1.210.500.000	9	1.335.500.000	9	1.485.500.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	10	10	10.500.000	10	10.000.000	10	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	100	100.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	155.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	155.000.000	100	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	100.000.000	750	100.000.000	12	100.000.000	15	125.000.000	15	125.000.000	15	125.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	100.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	Paket	12	12	100.000.000	4	30.000.000	12	85.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	30	200.000.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	350.000.000	60	350.000.000	100	725.500.000	100	725.500.000	100	725.500.000	100	725.500.000	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	75.000.000	6	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10	10	75.000.000	2	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah	Unit	120	223	3.336.044.000	300	3.138.807.455	100	300.000.000	100	765.000.000	200	800.000.000	120	900.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				1	1.983.807.455									
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		2	350.000.000					100	510.000.000					
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	120	120	815.044.000	75	900.000.000	100	300.000.000			100	300.000.000	120	900.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		100	2.171.000.000	200	255.000.000			100	255.000.000	100	500.000.000			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	25	12	2.100.800.375	10	717.500.000	25	707.500.000	25	707.500.000	25	910.000.000	25	860.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	50	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	148.083.900	12	260.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	350.000.000	12	400.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.945.216.475	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	550.000.000	12	450.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara	Unit	87	87	1.900.000.000	100	2.775.000.000	1	2.450.000.000	1	2.600.000.000	1	2.800.000.000	1	3.032.500.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	74	74	1.425.000.000	75	2.400.000.000	74	2.000.000.000	74	2.000.000.000	74	2.000.000.000	74	2.000.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	50	50	175.000.000	120	75.000.000	50	150.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	500.000.000	3	732.500.000	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					3.576.405.900		4.165.000.000		5.360.750.318		6.435.000.000		6.333.307.455		6.285.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	18	18	1.381.337.600	100	1.850.000.000	100	2.750.000.000	100	2.850.000.000	100	2.933.307.455	100	2.900.000.000	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	1.342.258.100	100	1.485.000.000	100	1.620.750.318	100	1.885.000.000	100	2.050.000.000	100	1.885.000.000	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	852.810.200	100	830.000.000	100	990.000.000	100	1.700.000.000	100	1.350.000.000	100	1.500.000.000	
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota																Kegiatan SPM
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persentase	18,1	18	361.212.400	100	550.000.000	100	1.000.000.000	100	1.300.000.000	100	1.253.307.455	100	1.000.000.000	

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	200	200	126.541.800	500	550.000.000	100.283	1.000.000.000	100.283	1.000.000.000	100.283	1.253.307.455	100.283	1.000.000.000	Sub Kegiatan SPM
Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	234.670.600					1	300.000.000					Kegiatan Sub SPM
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																Kegiatan SPM
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	19,6	100	1.020.125.200	100	1.300.000.000	100	1.750.000.000	100	1.550.000.000	100	1.680.000.000	100	1.900.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unt	100	100	126.541.800	275	450.000.000	100	250.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	150.000.000	Sub Kegiatan SPM
Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	500	500	126.130.800	500	250.000.000	500	350.000.000	600	350.000.000	600	350.000.000	600	350.000.000	Sub Kegiatan SPM
Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	10	10	99.571.600					10	150.000.000	10	150.000.000	50	250.000.000	

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	4	4	113.184.000	3	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	25	25	100.000.000											
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	204.697.000			1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Sub Kegiatan SPM
Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	2	2	100.000.000	365	130.000.000	365	130.000.000	365	130.000.000	365	130.000.000	365	130.000.000	Sub Kegiatan SPM
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPE) Kab/ Kota sampai dengan dinyatakan sah / legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1					1	300.000.000					1	300.000.000	Sub Kegiatan SPM
Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	4	4	150.000.000	4	320.000.000	4	320.000.000	4	320.000.000	4	450.000.000	4	320.000.000	Sub Kegiatan SPM

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																	Kegiatan SPM
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase	100	100	1.342.258.100	100	1.485.000.000	100	1.620.750.318	100	1.885.000.000	100	2.050.000.000	100	1.885.000.000		
Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	1	73.823.400	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		Sub Kegiatan SPM
Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDE yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	74.571.600	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		Sub Kegiatan SPM
Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	4.500	4.500	290.205.500	4.500	600.000.000	4.500	600.000.000	4.500	600.000.000	4.500	650.000.000	4.500	600.000.000		Sub Kegiatan SPM
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPPD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	10	10	254.938.800	10	100.000.000	5	50.000.000	10	100.000.000	15	150.000.000	10	100.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	700	700	480.735.000	700	550.000.000	4.500	700.000.000	6.000	950.000.000	6.000	950.000.000	6.000	950.000.000		
Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		Sub Kegiatan SPM

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	1	67.983.800	1	10.000.000	1	45.750.318	1	10.000.000	1	75.000.000	1	10.000.000	
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																Kegiatan Pendukung Program
Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	2	852.810.200	7	830.000.000	6	990.000.000	7	1.700.000.000	7	1.350.000.000	4	1.500.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	1	53.802.400	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000			
Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	2	2	48.425.200	2	50.000.000	2	60.000.000,00	3	100.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1	1	68.500.000			1	80.000.000	1	450.000.000	12	300.000.000	1	300.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	10	10	89.500.000	10	30.000.000			10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	10	10	95.997.000					10	250.000.000					

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	15	15	60.568.000			10	200.000.000			15	150.000.000	15	150.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	Kegiatan	10	10	47.538.800	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab / Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	10	10	70.429.200							10				
Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Mukdat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah / legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	2	2	70.681.000	2	50.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R#P) Kab / Kota	Jumlah Penyelesaian dokumen	Dokumen	2	2	150.000.000	1	250.000.000	2	150.000.000	3	200.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah / legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	97.368.600	1	50.000.000							12	300.000.000,0	

4.4 Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM
			Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM
			Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Bencana	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM
			Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM
			Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM
			Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Bencana Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM
			Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM
			Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM
		Meningkatnya Penanganan Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan	Kegiatan penunjang IKU, IKK

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		Saat Tanggap Darurat	dan Evakuasi Korban Bencana	dan SPM
			Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Sub Kegiatan penunjang IKU dan SPM
			Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU dan SPM
			Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK dan SPM
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU
			Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Sub Kegiatan penunjang IKU dan SPM
			Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Sub Kegiatan penunjang IKU, IKK
		Meningkatnya Penanganan Bencana Saat Pasca Bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kegiatan penunjang IKU
			Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU
			Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Sub Kegiatan penunjang IKU

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Sub Kegiatan penunjang IKU
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Sub Kegiatan penunjang IKU
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU
			Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU
			Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan penunjang IKU

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) merupakan ukuran pokok yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana. IKU ini fokus pada Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, yang menggambarkan sejauh mana daerah mampu melaksanakan fungsi kesiapsiagaan, mitigasi, respon darurat, hingga rehabilitasi pascabencana.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk dapat menjamin sistem penanggulangan bencana yang andal, terukur, dan berkelanjutan, kemudian untuk dapat meningkatkan kualitas layanan kebencanaan, serta mendorong pemerintah daerah lebih aktif dalam pengurangan risiko bencana. Indikator Kinerja Utama dijadikan sebagai indikator strategis yang dapat memastikan peningkatan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari tahun ke tahun, dengan komponen penilaian dari kesiapsiagaan terhadap bencana, penyuluhan dan edukasi kebencanaan, sarana dan prasarana kebencanaan, serta tindak lanjut pascabencana.

Adapun berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibunlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	80 (Sangat Baik)	82 (Sangat Baik)	84 (Sangat Baik)	86 (Sangat Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam menangani dan mengelola kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan bencana. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan upaya pencegahan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi. Beberapa komponen yang mungkin termasuk dalam indeks ini antara lain: 1. Kesiapsiagaan terhadap bencana, seperti pelatihan, simulasi, dan koordinasi antar instansi terkait. 2. Penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan saat bencana. 3. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana, seperti sistem peringatan dini dan pusat informasi bencana. 4. Tindak lanjut pasca bencana, termasuk pemulihan dan rehabilitasi bagi korban bencana. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa daerah memiliki sistem yang siap dan responsif terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi, serta mampu meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan indikator operasional yang digunakan untuk menilai kualitas dan capaian pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini berfokus pada layanan langsung, kesiapsiagaan masyarakat, serta ketersediaan dokumen kebencanaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai memiliki 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dapat diuraikan sebagai tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)	(12)
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Persen	33%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V PENUTUP

A. Uraian Singkat

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang menjabarkan visi, misi, dan program prioritas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis selama lima tahun ke depan dalam upaya mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana, serta mendukung posisi strategis Kutai Kartanegara sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tidak hanya bergantung pada internal BPBD, melainkan memerlukan sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Melalui Renstra ini, diharapkan indeks risiko bencana dapat diturunkan, dan pelayanan kebencanaan baik pada fase pra-bencana, tanggap darurat, maupun pascabencana dapat berjalan optimal, cepat, dan akuntabel.

B. Kaidah Pelaksanaan

Agar Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan secara efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Legalitas dan Konsistensi: Renstra BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD setiap tahunnya. Seluruh program dan kegiatan tahunan harus memiliki benang merah yang konsisten dengan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra ini.
2. Basis Penganggaran: Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA). Alokasi sumber daya anggaran harus memprioritaskan program-program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap pengurangan risiko bencana.

3. Koordinasi Lintas Sektor: Mengingat penanggulangan bencana adalah urusan bersama, pelaksanaan program dalam Renstra ini wajib mengedepankan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Pusat (BNPB).
4. Fleksibilitas Adaptif: Meskipun bersifat mengikat, pelaksanaan Renstra tetap memperhatikan dinamika kebencanaan yang mungkin terjadi. Penyesuaian operasional dimungkinkan dalam kondisi darurat bencana (Force Majeure) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pengendalian dan Evaluasi

Untuk menjamin akuntabilitas dan ketercapaian kinerja, mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan berkala.

1. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana kerja tahunan berjalan sesuai dengan target dan koridor yang ditetapkan dalam Renstra. Langkah-langkah pengendalian meliputi:

- **Monitoring Berkala:** Dilakukan setiap triwulan untuk memantau realisasi fisik dan keuangan, serta mengidentifikasi kendala teknis di lapangan sedini mungkin.
- **Pengawasan Internal:** Dilakukan oleh unsur pimpinan BPBD secara berjenjang untuk memastikan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kebencanaan.
- **Tindak Lanjut Temuan:** Segala deviasi atau ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat monitoring harus segera ditindaklanjuti dengan langkah korektif agar target akhir tahun tetap dapat tercapai.

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan dan dampak dari program yang telah dilaksanakan. Mekanisme evaluasi mencakup:

- **Evaluasi Tahunan:** Dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Hasil evaluasi ini menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- **Evaluasi Paruh Waktu (Mid-Term Review):** Dilakukan pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra untuk meninjau relevansi strategi dengan kondisi lingkungan strategis terkini.
- **Evaluasi Akhir Periode:** Dilakukan pada akhir tahun 2029 untuk menilai capaian total selama lima tahun. Hasil evaluasi ini akan menjadi landasan data (baseline) bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

Demikian Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ini disusun. Komitmen, integritas, dan kerja keras seluruh aparatur BPBD serta dukungan seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan demi terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang tangguh bencana.

Tenggarong, 09 Januari 2026

